



UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN / PROGRAM STUDI AKUNTANSI

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)		Semester	Tgl Penyusunan
Pendidikan Kewarganegaraan	PP 000207	2		1	12 September 2018
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS		Koordinator Bidang Keahlian	Ketua Program Studi Akuntansi	
	 Gatot Subiyakto, SH.,MM		 Dr. Ary Natalina, S.Sos.,MM	 Dr. Imam Subaweh, SE., MM., Ak., CA.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah				
	CPL 1	Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air,memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;			
	CPL 2				
	CPL 3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)				
	CPMK1	Mampu menjelaskan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD1945 dan hakekat pendidikan kewarganegaraan.			
	CPMK 2	Mampu menjelaskan identitas nasional, integrasi nasional, UUD 1945, hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi dan HAM.			
CPMK 3	Mampu menjelaskan wawasan nusantara., ketahanan nasional dan bela negara				

Diskripsi Singkat MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menitik beratkan pada pembentukan sikap mental melalui pola pikir komprehensif integral. Mahasiswa mampu menjelaskan hakekat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, UUD 1945, hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi dan HAM, wawasan nusantara, ketahanan nasional dan bela Negara.
-----------------------------	--

Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Konsep dan urgensi , alasan, sumber historis, sosiologis dan politik , dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. 2. Konsep dan urgensi , alasan, sumber historis, sosiologis dan politik , dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi dari identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. 3. Konsep dan urgensi , alasan, sumber historis, sosiologis dan politik , dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi dari Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Konsep dan urgensi , alasan, sumber historis, sosiologis dan politik , dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi dari UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. 5. Konsep dan urgensi , alasan, sumber historis, sosiologis dan politik , dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi dari kewajiban dan hak Negara dan warganegara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. 6. Konsep dan urgensi , alasan, sumber historis, sosiologis dan politik , dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi dari demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 7. Konsep dan urgensi , alasan, sumber historis, sosiologis dan politik , dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi dari penegakan hokum yang berkeadilan. 8. Konsep dan urgensi , alasan, sumber historis, sosiologis dan politik , dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi dari wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. 9. Konsep dan urgensi , alasan, sumber historis, sosiologis dan politik , dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi dari ketahanan nasional dan bela Negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan.	
Daftar Referensi	Utama: 1. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Ditjen Belmawa Ristekdikti, cetakan I, 2016. 2. UUD 1945 Hasil Amandemen Agustus 2002, Jakarta. 3. Universitas Gunadarma, Diktat Kuliah Pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan, Edisi 2006 4. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si, 2007 5. Hukum dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam kerangka keutuhan NKRI oleh Prof. DR Ermaya Suradinata, SH.MS,MH, 2005 Pendukung: 1. Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk PT, Tim Edukasi DJP, Cetakan I 2016 2. Buku-buku Pendidikan Kewarganegaraan dan sumber lainnya.	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras : Notebook &LCDProjector
Nama Dosen Pengampu		
Matakuliah prasyarat (Jika ada)		

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu menjelaskan tentang dan memahami hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau professional. (CPL 1, CPMK 1.1)	1. Konsep dan urgensi pend. kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 2. Alasan mengapa diperlukan pend. kewarganegaraan 3. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang pend. kewarganegaraan di Indonesia 4. Argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan 5. Esensi dan urgensi pend. kewarganegaraan untuk masa depan 6. Konsep warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa*.	- Bentuk: Kuliah - Metode: Diskusi kelas dan contoh kasus	TM: 1x(2x50") BM: 1x(2x60")	- Menyusun ringkasan materi tentang hakikat mata kuliah kewarganegaraan dan hakikat cinta tanah air. - Ringkasan materi kuliah dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam belajar.	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk non-test: Tulisan ringkasan materi kuliah	- Ketepatan menjelaskan tentang latar belakang, alasan dan dasar hukum pendidikan kewarganegaraan; - Ketepatan menjelaskan pengertian cinta tanah air dan rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa.	5
2, 3	Mampu memahami dan menjelaskan esensi dan urgensi Identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa	1. Konsep dan urgensi Identitas nasional 2. Alasan mengapa diperlukan Identitas nasional 3. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang Identitas nasional Indonesia - Bendera Negara Indonesia - Bahasa Negara Indonesia	Bentuk: Kuliah Metode: Discovery Learning, Diskusi dlm kelompok	TM: 2x(2x50") TT:2x(2x60") BM:2x(2x60")	- Mengkaji dan mensarikan artikel tentang identitas nasional - Menyusun makalah kelompok dengan pokok pembahasan lambang-lambang negara dihubungkan dengan rasa	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika penyusunan makalah Bentuk non-test:	- Ketepatan dalam mensarikan materi identitas negara dan nasionalisme; - Ketepatan dalam menjawab	10

dan karakter
CPL 2, CPMK
2.1)

		• Lambang Negara Indonesia • Lagu Kebangsaan Indonesia Raya • Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika • Dasar falsafah Negara Pancasila 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan 5. Esensi dan urgensi pend. kewarganegaraan untuk masa depan 6. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia 7. Negara RI terdiri dari kepulauan dari Sabang sampai Merauke membutuhkan pertahanan yang kuat untuk keutuhan NKRI. Amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia maka dibutuhkan peran Pajak untuk membiayai Pertahanan dan Ketahanan bangsa* 8. Esensi dan urgensi identitas nasional 9. Menumbuhkan rasa nasionalisme, perwujudan bela Negara*.			nasionalisme. (Tugas-1).	• Tulisan makalah • Presentasi	pertanyaan dalam diskusi kelas yang berhubungan dengan identitas negara dan nasionalisme; • Sistematika dan gaya presentasi	
4	Mampu memahami	1. Konsep dan urgensi Integrasi	• Bentuk:	TM: 1x(2x50")	• Menyusun ringkasan	Kriteria:	Ketepatan	10

	dan menjelaskan tentang Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. (CPL 2 , CPMK 2.2)	nasional • Makna Integrasi nasional • Jenis Integrasi nasional • Pentingnya Integrasi nasional 2. Alasan mengapa diperlukan Integrasi nasional 3. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang Integrasi nasional • Perkembangan sejarah Integrasi di Indonesia • Pengembangan Integrasi di Indonesia 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Integrasi nasional 5. Esensi dan urgensi Integrasi nasional	Kuliah • Metode: Diskusi kelas dan contoh kasus	BM: 1x(2x60")	materi tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. • Ringkasan materi kuliah dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam belajar.	Rubrik kriteria grading Bentuk non-test: • Tulisan ringkasan materi kuliah	menjelaskan tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa.	
5	Mampu memahami dan menjelaskan tentang nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuanperundang-undangan di bawah UUD. (CPL 3, CPMK 3.1)	1. Konsep dan urgensi Konstitusi dalam kehidupan berbangsa Negara 2. Alasan mengapa diperlukan Konstitusi dalam kehidupan berbangsa Negara Indonesia 3. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang Konstitusi dalam kehidupan berbangsa Negara Indonesia 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Konstitusi dalam kehidupan berbangsa Negara Indonesia 6. Esensi dan urgensi Konstitusi	• Bentuk: Kuliah • Metode: Diskusi kelas dan contoh kasus Self Learning	TM: 1x(2x50") BM: 1x(2x60")	•Menyusun ringkasan materi tentang UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawah UUD. •Ringkasan materi kuliah dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam belajar.	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk non-test: • Tulisan ringkasan	Ketepatan menjelaskan tentang UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawah UUD.	5

		dalam kehidupan berbangsa Negara						
6, 7	Mampu memahami dan menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. (CPL 2, CPMK 2.3)	1. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara 2. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara Indonesia 3. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara Indonesia • Sumber Historis • Sumber Sosiologis • Sumber Politik 4. Pasal 23A UUD 1945 salah satu contoh kewajiban warga Negara untuk membayar pajak, dan warga Negara akan memperoleh hak timbal balik dari Negara berupa manfaat hasil pembangunan* 1. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara • Aturan dasar tentang pendidikan dan kebudayaan serta IPTEK • Aturan dasar tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial • Aturan dasar tentang usaha	Bentuk: Kuliah Metode: Discovery Learning, Diskusi dlm kelompok	TM: 2x(2x50") TT:2x(2x60") BM:2x(2x60")	• Mengkaji dan mensarikan artikel tentang hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara • Menyusun makalah kelompok dengan pokok demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. (Tugas-2).	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika penyusunan makalah Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi	• Ketepatan dalam mensarikan materi hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara • Ketepatan dalam menjawab pertanyaan dalam diskusi kelas yang berhubungan dengan hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara dan demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. • Sistematika dan gaya presentasi	15

		pertahanan dan keamanan Negara • Aturan dasar tentang hak dan kewajiban azasi manusia 2. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak Negara dan warganegara • Agama • Pendidikan dan kebudayaan • Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat • Pertahanan keamanan						
8, 9	Mampu memahami dan menjelaskan tentang hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 (CPL 3, CPMK 3.2)	1. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila • Arti demokrasi • Tiga tradisi pemikiran politik demokrasi • Demokrasi Indonesia • Demokrasi sebagai system politik kenegaraan modern 2. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila 3. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila • Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa • Sumber nilai yang berasal dari Islam • Sumber nilai yang berasal dari barat 4. Membangun argumen tentang dinamika dan	Bentuk: Kuliah Metode: Discovery Learning, Diskusi dlm kelompok	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	• Mengkaji dan mensarikan artikel tentang demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 • Menyusun makalah kelompok dengan pokok bahasan demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. (Tugas-3).	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika penyusunan makalah Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi	• Ketepatan dalam mensarikan pokok bahasan demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 • Ketepatan dalam menjawab pertanyaan dalam diskusi kelas yang berhubungan dengan pokok bahasan demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.	15

		tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila ▪ MPR ▪ DPR ▪ DPD 5. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila ▪ Demokrasi yang diterapkan ▪ Pentingnya demokrasi • Demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat Negara 6. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sekitar (75%) dari APBN. Oleh karena itu pajak memegang peranan yang sangat vital bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara*					• Sistematika dan gaya presentasi	
10	Mampu memahami dan menjelaskan tentang dinamika historis konstitusional, social politik, cultural, serta kontek kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. CPL 1, CPMK 1.2)	1. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan 2. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan 3. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia • Lembaga penegak hukum • Lembaga peradilan 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di	• Bentuk: Kuliah • Metode: Discovery Learning, Diskusi dlm kelompok	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	• Mengkaji dan mensarikan artikel tentang penegakan hukum yang berkeadilan. • Menyusun makalah kelompok dengan pokok bahasan lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia (Tugas-4).	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika penyusunan makalah Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi	Ketepatan dalam mensarikan pokok bahasan penegakan hukum yang berkeadilan. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan dalam diskusi kelas yang berhubungan dengan pokok bahasan	10

		Indonesia 5. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan					lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia	
11	UJIAN TENGAH SEMESTER							
12, 13	Mampu memahami dan menjelaskan tentang Wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. (CPL 1, CPMK 1.3)	- Konsep dan urgensi Wawasan Nusantara - Alasan mengapa diperlukan Wawasan Nusantara - Menumbuhkan kesadaran membayar pajak untuk ketahanan dan keutuhan NKRI*. - Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang Wawasan Nusantara - Latar belakang historis - Latar belakang sosiologis - Latar belakang politis - Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Wawasan Nusantara - Esensi dan urgensi Wawasan Nusantara - Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik - Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi - Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu	- Bentuk: Kuliah - Metode: Diskusi kelas dan contoh kasus Self Learning	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	- Menyusun ringkasan materi tentang Wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. - Ringkasan materi kuliah dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam belajar.	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk non-test: Tulisan ringkasan	Ketepatan menjelaskan tentang Wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.	15

		kesatuan social budaya • Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan hankam						
14, 15	Mampu memahami dan menjelaskan Ketahanan nasional dan bela Negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. (CPL 1, CPMK 1.4)	1. Konsep dan urgensi Ketahanan nasional dan bela Negara ▪ Wajah ketahanan nasional Indonesia ▪ Dimensi dan ketahanan nasional berlapis ▪ Bela Negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional 2. Alasan mengapa diperlukan Ketahanan nasional dan bela Negara 1. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang Ketahanan nasional dan bela Negara 2. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Ketahanan nasional dan bela Negara 3. Esensi dan urgensi ▪ Ketahanan nasional ▪ Bela Negara	• Bentuk: Kuliah • Metode: Diskusi kelas dan contoh kasus Self Learning	TM: 2x(2x50") BT:2x(2x60") BM:2x(2x60")	• Menyusun ringkasan materi tentang Ketahanan nasional dan bela Negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. • Ringkasan materi kuliah dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam belajar.	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk non-test: • Tulisan ringkasan	Ketepatan menjelaskan tentang Ketahanan nasional dan bela Negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan.	15
16	UJIAN AKHIR SEMESTER							

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiridariaspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahasan atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.